

Perempuan dan Ketahanan Pangan (Rumah Tangga) pada Masa Revolusi

Widya Fitria Ningsih*

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur, Yogyakarta - Indonesia

*Alamat korespondensi: widya.fitrianingsih@ugm.ac.id
DOI: 10.14710/jscl.v9i1.59981

Diterima/Received: 26 November 2023; Direvisi/Revised: 18 Juli 2024; Disetujui/Accepted: 21 Juli 2024

Abstract

Women were primarily responsible for food security and nutrition within their households when their husbands, fathers, and sons went off to war. However, the narratives on women and their complex relationship with food problems during the Indonesian Revolution have, for long, merely been focused on their involvement in the communal kitchen. By focusing on food governance and women's role and experiences in food production, distribution, and consumption, this article examines (household) food security in Yogyakarta during the revolutionary period. Yogyakarta was purposefully chosen as the research site because it was the birthplace of the Indonesian women's movement and the epicentre of the physical revolution. Yogyakarta was purposefully chosen as the research site because it was the birthplace of the Indonesian women's movement and the epicentre of the physical revolution. The study uses historical methods to examine official documents, newspapers, and interviews within oral history. It shows that the looming food crisis during the revolution heightened awareness about national food security, prompting the development of various strategies, societal adaptation, and the resilience of women. It also reveals that the domestic roles imposed on women are indirectly a form of recognition of women as the main actors in the (household) food chain.

Keywords: *Women; Food Governance; (Household) Food security; and The Indonesian Revolution.*

Abstrak

Perempuan bertanggung jawab atas ketahanan pangan dan gizi dalam rumah tangga, terutama ketika suami, ayah, dan/ atau anak laki-laki pergi berperang. Namun demikian, narasi tentang perempuan dan kompleksitas permasalahan pangan pada masa Revolusi Indonesia, terfokus hanya pada keterlibatan mereka di dapur umum. Artikel ini mengkaji tentang ketahanan pangan (rumah tangga) di Yogyakarta pada masa revolusi dengan memusatkan perhatian pada pola pengaturan pangan serta peranan dan pengalaman perempuan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Yogyakarta sengaja dipilih sebagai lokus penelitian karena di wilayah inilah revolusi fisik berlangsung dan gerakan perempuan Indonesia dilahirkan. Dengan menggunakan metode bibliografi dan sejarah untuk memahami kondisi pangan pada masa revolusi, mengeksplorasi dokumen resmi, surat kabar sezaman dan wawancara dalam konteks sejarah lisan, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman krisis pangan pada masa revolusi telah membentuk kesadaran tentang ketahanan pangan nasional, memunculkan berbagai bentuk strategi, serta adaptasi masyarakat dan resiliensi perempuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran-peran domestik yang dibebankan dan dipaksakan kepada perempuan secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor utama dalam rantai pangan (rumah tangga).

Kata kunci: Perempuan; Pola Pengaturan Pangan; Ketahanan Pangan (Rumah Tangga); dan Revolusi Indonesia.

Pendahuluan

Ketahanan pangan yang dikampanyekan melalui berbagai program saat ini lebih banyak memuat gagasan tentang pengelolaan pangan yang ideal dalam situasi normal atau masa damai. Padahal, pada periode krisis dan perang, pengelolaan pangan sama sekali berbeda. Semua aspek

pengelolaan yang meliputi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan melalui pola makan sehat bergizi dan seimbang, serta keamanan dan stabilitas pangan tidak dapat terpenuhi. Apalagi, preferensi makanan, perilaku hidup bersih dan sehat yang tentu tidak menjadi fokus utama. Makan tetap dilakukan namun bukan untuk memenuhi gizi seimbang, melainkan sebagai aktivitas yang menyediakan sumber energi bagi tubuh dan

mengisi lambung agar tetap kenyang. Periode krisis akibat perang inilah yang kemudian memunculkan kesadaran akan apa yang saat ini dikenal sebagai ketahanan pangan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagai sebuah kesadaran, konsep, serta pendekatan dan gerakan, ketahanan pangan di dunia bermula dari upaya penanggulangan krisis pangan pasca-Perang Dunia (PD) II (Maxwell 1996; Salvatici 2015). Wieters dan Inaudi (2015) misalnya, menunjukkan bagaimana bantuan pangan internasional dimobilisasi untuk warga sipil yang menjadi korban perang. Sementara itu, dilihat dari perspektif kelembagaan, periode pasca-PD II diidentifikasi sebagai periode transisi, ketika ketahanan pangan mulai ditangani secara khusus melalui pembentukan Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. PBB kemudian membentuk lembaga khusus untuk menangani persoalan pangan global, bernama World Food Programme (WFP) atau Program Pangan Sedunia pada 1960an. Periode 1960an ini kemudian ditandai sebagai periode awal yang mengantarkan pada kebijakan-kebijakan pangan kontemporer (Salvatici 2015, 348).

Pola pengaturan pangan di Indonesia telah menjadi isu utama sejak masa kolonial. Pierre van Der Eng misalnya, menunjukkan bahwa sejak 1920an, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berupaya meningkatkan produktivitas beras sebagai bahan pangan utama (*hoofdvoedingsmiddel*), diversifikasi nonberas, distribusi dan sistem pengawasan yang ketat terhadap produksi pangan untuk menghindari kekurangan gizi dan kelaparan. Pemerintah kolonial mengawasi produksi pangan melalui laporan statistik Centraal Kantoor voor de Statistiek (Kantor Pusat Statistik). Centraal Kantoor voor de Statistiek setiap bulan selalu melaporkan area tanam, hasil panen, dan gagal panen dari semua tanaman pertanian tahunan. Laporan statistik rutin itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengukur keseimbangan antara produksi dan pasokan pangan dengan populasi di Jawa yang terus bertambah yang juga merupakan indikator utama perkembangan ekonomi di Jawa (Van der Eng 2020, 4).

Pemerintah kolonial juga membentuk sebuah lembaga penelitian gizi bernama Instituut voor Volksvoeding (IVV) dan Yayasan Bahan Makanan. IVV bertugas mengoptimalkan pengawasan terhadap konsumsi pangan. Sementara itu, Yayasan Bahan Makanan berfokus pada pembentukan cadangan penyangga makanan untuk mengantisipasi dampak perang terhadap perdagangan internasional. Dalam konteks pemenuhan gizi seimbang dan upaya menghindari bahaya kelaparan, kedua lembaga itu menjadi sangat aktif pada masa PD II (Van der Eng 2020, 5-13).

Pada 1940 misalnya, IVV menyusun sebuah monograf yang kemudian diterjemahkan oleh H.B. Jassin ke dalam bahasa Melayu berjudul Makanan Jang Baik di Masa Perang dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku itu menjelaskan pola dan menu makanan pada masa perang berikut komposisi zat dalam pola dan menu makanannya (IVV 1940, 1-40). Buku terbitan Balai Pustaka lainnya berjudul Memboeat Makanan Jang Tahan Lama juga menunjukkan kesadaran tentang pentingnya mempunyai persediaan pangan yang cukup setiap saat dan terutama ketika terjadi kerawanan pangan akibat bencana alam, krisis ekonomi, dan perang (Coorengel 1940, 1-88).

Selain itu, beberapa terbitan sezaman menunjukkan kesadaran akan ketahanan pangan, terutama terkait diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan. Sebagai contoh adalah *Gezonde voeding: leerboek ten dienste van het huishoudonderwijs in Nederlandsch-Indië* (1940) yang ditulis oleh seorang ahli gizi bernama G.A. de Mol. Dalam buku tersebut, penulis menyusun komposisi menu makan ideal berbahan dasar selain beras, yaitu terutama ketela pohon atau singkong sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan nilai gizi baik untuk dikonsumsi pada masa krisis (De Mol 1940, 1-80; Rahman 2021, 229).

Diversifikasi pangan melalui pengolahan singkong ini juga sudah diinisiasi sejak sebelum PD II. Hal itu dapat ditelusuri melalui sebuah terbitan berjudul *Gaplek als grondstof voor de bereiding van cassavemeel*, karya E.K.E. Halewijn yang merupakan seorang konsultan industri pangan. Halewijn menjelaskan proses pengolahan *gaplek* yang merupakan produk olahan singkong. *Gaplek*

diproduksi menjadi *cassavameel* atau tepung singkong terutama di kawasan karst dataran tinggi di Jawa, seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepung singkong itulah yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai jenis makanan, seperti *tiwul*, *gogik* (*tiwul* yang dikeringkan), *growol*, dan *gatot*, serta berbagai macam kue (Halewijn 1932, 1-29). Terkait produksi singkong, Van der Eng menjelaskan bahwa pada periode tersebut, Jawa merupakan salah satu pemasok utama tepung singkong dan keripik singkong kering ke pasar dunia yang mampu mengeksport sekitar 10-15% produk singkong (Van der Eng 1994, 8-17).

Seri *Pedoman Roemah Tangga* terbitan Balai Pustaka tahun 1941 juga memberikan gambaran mengenai kesadaran masyarakat akan diversifikasi dan akses pangan yang murah dengan memanfaatkan dan mengolah bahan pangan lokal. Dalam *Pedoman Roemah Tangga: Makanan jang Moerah* tetapi Baik misalnya, dijelaskan cara mengolah umbi-umbian lokal yang mudah tumbuh dan mudah didapat sebagai bahan makanan alternatif, seperti singkong, ubi, bengkuang, ararut, ganyong, talas, *gadung*, *senté*, dan *soeweg*. Penjelasan mengenai pengolahan bahan makanan, khususnya empat jenis umbi terakhir, bertujuan untuk meminimalisasi berbagai kasus keracunan akibat salah olah (Instituut Voor Volksvoeding 1941, 1-21). Adapula buku berjudul *Pedoman Roemah Tangga: Masak-Masakan Moerah* yang berisi berbagai resep olahan umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan lokal menjadi berbagai hidangan pembuka (*appetizer*), hidangan utama (*main course*), dan hidangan penutup (*dessert*). Sebagai contoh adalah nangka yang dapat diolah menjadi hidangan pembuka, utama, dan penutup. Masing-masing berupa cara membuat nangka goreng, gudeg nangka, dan kolak nangka (Instituut Voor Volksvoeding 1941, 1-56).

Dalam buku *Pedoman Roemah Tangga* juga ditampilkan rekam jejak keterlibatan perempuan dalam upaya mewujudkan apa yang kini dikenal sebagai ketahanan pangan. Sjamsiddar Asjik, seorang guru perempuan di Sekolah *Roemah Tangga Gubernémén* (Onderwijs in de huishoudelijke vakken) sekaligus penulis buku tersebut memberikan pengetahuan bagaimana perempuan mampu memaksimalkan pemanfaatan

bahan pangan di sekitar tempat mereka tinggal dan akhirnya mampu merancang strategi untuk mengatasi kondisi rawan pangan. Buku serial itupun merefleksikan perempuan yang hampir selalu diidentikkan dengan pekerjaan domestik. Hal tersebut diappropriasi melalui ilustrasi sampul buku berupa siluet beberapa perempuan yang sedang menyiapkan bahan makanan dan memasak lengkap dengan berbagai peralatan dapurnya. Meskipun demikian, ilustrasi tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap peranan penting perempuan dalam rantai pangan rumah tangga.

Pada masa penjajahan Jepang, produksi pangan di Jawa secara umum mengalami penurunan akibat kontrol dan pembatasan perdagangan produk makanan dalam negeri dan sistem pembelian paksa oleh Pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Pemerintah Jepang juga mengubah Yayasan Bahan Makanan menjadi Syokuryo Kanri Zimusho (Kantor Pengelolaan Pangan) yang bertugas mengontrol pendistribusian makanan, terutama kepada pasukan militer Jepang, *Romusha*, *Heiho*, dan pasukan tambahan Indonesia lainnya, pegawai negeri sipil, serta para tahanan perang di kamp-kamp penahanan (Sato 1996, 115-53; Kurasawa 1998, 113-80; Van der Eng 1994, 8-17).

Guna meningkatkan produksi pangan, Pemerintah Jepang membuat beberapa perencanaan di antaranya dengan memperluas *Noomuka* atau Layanan Penyuluhan Pertanian yang kemudian bertransformasi menjadi Jawatan Pertanian Rakyat pada masa kemerdekaan (Van Der Eng 2020, 6). Dalam konteks keterlibatan perempuan, Pemerintah Jepang memobilisasi para perempuan untuk mengolah bahan pangan yang tersedia, seperti kulit singkong, jantung, dan *gedebog* (pelepah) pisang menjadi menu baru. Adapula makanan olahan bernama “bubur perjuangan” yang terbuat dari campuran ubi, singkong, dan bekatul (Kurosawa 1993, 104; Restu 2018, 70). Namun demikian, produksi pangan terus mengalami penurunan karena berbagai faktor, mulai dari pengabaian sistem irigasi dan meningkatnya erosi lahan pertanian, berkurangnya tenaga kerja, menurunnya jumlah ternak sapi dan kerbau yang tersedia untuk membuka lahan

budidaya, hingga terhentinya sistem transportasi (Van der Eng 1994, 20).

Periode revolusi tidak berbeda dari periode sebelumnya. Pasokan pangan di Jawa mengalami penurunan, terutama karena berkurangnya produksi pangan nonberas. Perlawanan menentang upaya Belanda kembali ke Indonesia juga turut menghambat distribusi pangan dari daerah penghasil bahan pangan ke daerah yang kekurangan pangan. Di Yogyakarta, terutama di desa-desa, tempat di mana revolusi fisik berlangsung, pasokan pangan menjadi semakin sulit untuk diamankan. Kondisi tersebut diperparah oleh beberapa faktor. Pertama, penambahan jumlah penduduk akibat masuknya pejabat pemerintah, tentara, dan pengungsi, terutama setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Kedua, panen pada 1946 yang tidak lebih baik dari panen tahun sebelumnya karena curah hujan yang tinggi, hama tanaman, kerusakan saluran irigasi, dan kekurangan tenaga kerja akibat mobilisasi penduduk untuk kepentingan perang. Selain itu, situasi di pedesaan yang tidak aman menyebabkan petani tidak berani bercocok tanam. Ketiga, pembatasan transportasi yang telah menyebabkan keterlambatan proses distribusi bahan pangan (Van der Eng 1994, 39-44; ANRI 1987, No. 120)

Pola pengaturan (*governance*) bahan pangan di Yogyakarta, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan sebenarnya tidak banyak dijelaskan, terlebih mengenai sejauh mana dan dalam hal apa perempuan dilibatkan dan/ atau terlibat dalam mengatasi persoalan pangan (rumah tangga) di tengah situasi krisis akibat revolusi fisik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua hal tersebut yang diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan operasional sebagai berikut: sejauh manakah kondisi krisis pada masa revolusi telah membentuk kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan? Pola pengaturan (*governance*) seperti apa yang dilakukan dalam mengatasi persoalan pangan? Sejauh mana dan dalam hal apakah perempuan terlibat dan/ atau dilibatkan dalam pengelolaan pangan? Siapa saja perempuan yang terlibat dan/ atau dilibatkan dalam upaya menjaga ketahanan pangan? Apa definisi ketahanan pangan (rumah tangga)? Apa bentuk strategi dan adaptasi masyarakat (perempuan)

dalam mengatasi persoalan pangan (rumah tangga)?; Potensi dan sumber daya pangan lokal apa saja yang dikembangkan dan dimanfaatkan perempuan? Memori dan pengalaman konsumsi seperti apa yang diingat?

Studi terkini soal ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan pendekatan mikro, terutama pada kontribusi individu dan rumah tangga dalam ketahanan pangan. Implikasi dari pendekatan ini adalah pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor utama dalam rantai pangan, sekaligus kelompok sosial yang rentan terhadap kerawanan pangan. Pengakuan tersebut sudah sangat umum dalam studi ketahanan pangan di Asia Selatan dan Afrika.

Choudhary dan Parthasarathy (2007) misalnya, mengkaji pola pemanfaatan waktu para perempuan yang tinggal di dua desa di India, yaitu Nanded dan Maharashtra. Pola tersebut digunakan untuk mengukur seberapa banyak dan dengan cara apa perempuan benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan rumah tangga (Choudhary & Parthasarathy 2007, 523-531). Sementara itu, Ramachandran (2008) menganalisisnya kembali dalam konteks masyarakat yang lebih luas, yaitu mengidentifikasi diskriminasi terhadap perempuan di Asia Selatan, terutama diskriminasi dalam akses terhadap makanan. Ramachandran (2008) menunjukkan bagaimana perempuan dikategorikan sebagai "sisa" dalam distribusi makanan di dalam rumah tangga. Perempuan menerima makanan dengan kualitas yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih sedikit dari laki-laki (Ramachandran 2008, 1-22).

Kerentanan perempuan dalam ketahanan pangan juga menjadi fokus kajian Uraguchi (2010). Kajiannya berfokus pada para perempuan dalam rumah tangga petani di Bangladesh dan Ethiopia. Ia menjelaskan bagaimana perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap kenaikan harga pangan. Padahal, dalam waktu yang bersamaan, mereka mampu merancang strategi untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan (Uraguchi 2010, 491-501). Tacoli, Bukhari, dan Fisher (2013) menguraikan bagaimana perempuan, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan Afrika, sering kali mengurangi kualitas dan kuantitas makanan dan melewatkan waktu makan guna memastikan anak mereka

cukup makan (Tacoli, Bukhari, & Fisher 2013, 1-23).

Nzayisenga, Orjuela, dan Schierenbeck (2016) menjelaskan bagaimana perempuan di pedesaan Rwanda mengalami dan memandang ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda keamanan. Dalam studi itu juga dipaparkan kesenjangan antara reformasi tingkat nasional yang dianggap berhasil meningkatkan produksi pangan dan pengalaman perempuan yang menunjukkan penurunan ketersediaan pangan, juga permasalahan dalam mengakses pangan akibat posisi yang tidak menguntungkan dalam rumah tangga dan struktur kekuasaan lokal (Nzayisenga, Orjuela, Schierenbeck 2016, 278-298).

Studi tentang ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia yang menggunakan pendekatan mikro dan berfokus pada perempuan sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, sejauh yang dapat ditelusuri, studi-studi tersebut lebih memusatkan perhatian pada persoalan medis dan sosiologis. Devi R (2015) telah mengkaji hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) perempuan usia subur (Devi R 2015). Sementara itu, studi yang bersifat sosiologis antara lain adalah studi pemberdayaan perempuan berbasis potensi sumber daya pangan lokal oleh tim peneliti Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. Studi itu menunjukkan signifikansi peranan perempuan dalam berbagai aspek ketahanan pangan rumah tangga (Poerwanto, Supraja, Harsoyo, & Soeprapto 2016, 93-101).

Studi soal pangan dengan pendekatan historis umumnya merujuk pada masa penjajahan Jepang. Studi-studi tersebut didominasi oleh narasi kerentanan pangan akibat kelangkaan, masalah akses dan distribusi bahan pangan semasa perang, gizi buruk masyarakat Bumiputera, dan sekilas tentang mobilisasi perempuan dalam pengolahan bahan pangan (Rambe 1983, 1-235; Kurosawa 1993, 32-66; Anderson 1996, 77-123; Kratoska 1998, 32-66; Sato 1998, 167-186; dan Restu 2018, 1-157). Adapun persoalan pangan pada masa revolusi secara khusus dikaji oleh Pierre Van der Eng. Akan tetapi, ia lebih memusatkan perhatiannya pada persediaan pangan, serta pengendalian dan pengaturan produksi pangan di Jawa secara umum, tanpa memperhatikan

kontribusi dan peranan perempuan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan (Van der Eng 1994, 1-87; Van der Eng 2020, 3-24).

Ketiadaan narasi tentang perempuan dalam studi pangan pada masa revolusi dan/ atau historiografi revolusi secara umum merupakan implikasi dari eksklusi terhadap keseharian perempuan. Sasi (2022, 29-44) menunjukkan bahwa historiografi revolusi sering kali mengabaikan agensi perempuan. Adapun jika merujuk pada perempuan dan persoalan pangan, maka narasi yang diproduksi terbatas pada pelibatan mereka di dapur umum selama masa revolusi fisik, terutama keterlibatan mereka dari mulai penyediaan logistik pangan melalui dapur umum, obat-obatan dan pendirian pos-pos Palang Merah Indonesia, hingga pekerjaan kurir, dan spionase. Sebagai contoh, buku mengenai peranan desa-desa di Yogyakarta pada masa revolusi terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dari 41 narasumber hanya ada tiga narasumber perempuan, terdiri atas dua petani dan satu anggota Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Narasi tentang ketiganya hanya terbatas pada peranan mereka yang secara bergantian menyajikan nasi, jagung, ubi, ketela, dan sayur-mayur di dapur umum (Tashadi, Harnoko, Suratmin, & Muryanto 1992, 1-181; Sumintarsih, Sumarsih, & Astuti 1990, 1-97; Suhatno 2006, 67-74; Astuti 2006, 75-79; Winarni, Sulistyono & Nurwanti 2013, 1-145).

Pengabaian terhadap agensi perempuan juga terlihat jelas pada historiografi Yogyakarta, wilayah yang dipilih sebagai lokus penelitian karena di wilayah inilah revolusi fisik berlangsung. Dalam bukunya, Surjomihardjo (2008) misalnya, menarasikan Yogyakarta sebagai kota yang seolah-olah hanya berpenghuni laki-laki, sehingga penuh dengan aktivitas laki-laki, melupakan fakta bahwa Yogyakarta merupakan bagian penting bagi pergerakan perempuan karena di kota inilah Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan dan gerakan perempuan dilahirkan. Kajian sosiologis tentang perubahan sosial di Yogyakarta dari periode kolonial hingga awal kemerdekaan oleh Soemardjan (1981) juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Tidak hanya itu, kajian-kajian tersebut telah mengabaikan realitas bahwa pada masa revolusi,

perempuan baik ibu dan anak lebih banyak tinggal di rumah. Akibatnya, peranan perempuan dalam rumah tangga berubah. Perempuan bukan hanya menggantikan laki-laki (suami atau ayah) dalam memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga, namun juga turut berkontribusi dalam kepentingan perang. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti empiris terkait keterlibatan perempuan dalam persoalan ketahanan pangan (rumah tangga) pada masa revolusi.

Metode dan Kerangka Dasar Konseptual

Penelitian yang mendasari artikel ini menggunakan metode bibliografi dan sejarah. Metode bibliografi digunakan untuk memberikan konteks dan pemahaman soal ketahanan pangan dan kondisi pangan pada masa perang, baik sebelum maupun ketika revolusi berlangsung. Sementara itu, metode sejarah digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan dan menggunakan data dari sumber primer dan sekunder, termasuk menilai bagaimana informasi yang didapatkan berkontribusi untuk memahami ketahanan pangan pada masa revolusi dan bagaimana perempuan menyikapi persoalan pangan pada periode tersebut.

Sumber sejarah yang didapatkan, digunakan, dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi koleksi arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, buku-buku langka koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Jakarta dan Perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta, serta artikel dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, 1945-1949. Wawancara dalam konteks sejarah lisan pun dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keseharian perempuan dalam mengatasi persoalan pangan pada masa revolusi. Wawancara hanya melibatkan enam narasumber perempuan, mengingat tidak banyak saksi mata yang masih hidup, juga kesulitan dalam mendapatkan izin dari keluarga karena umumnya mereka yang masih hidup sudah lanjut usia sehingga sangat rentan untuk diwawancarai. Adapun narasumber yang berhasil diwawancarai rerata berusia 10-15 tahun pada saat revolusi berlangsung dan berasal dari keluarga petani di Kulonprogo, Sleman, dan Gunung Kidul.

Sebelum membahas lebih jauh soal konsepsi ketahanan pangan, perlu disebutkan bahwa terminologi pangan dan makanan dalam artikel ini digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Secara konseptual ketahanan pangan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah:

“Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

Secara substantif definisi tersebut sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut FAO yang menyatakan bahwa:

“*Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*” (World Food Summit, 1996).

(Ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang, setiap waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dan sesuai preferensinya untuk hidup aktif dan sehat).

Dapat dilihat bahwa definisi ketahanan pangan tersebut memuat gagasan dan praktik tentang pengelolaan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan melalui pola makan sehat bergizi dan seimbang, serta keamanan dan stabilitas pangan yang ideal dalam situasi normal atau masa damai. Dalam banyak kasus, gagasan dan praktik ketahanan pangan di Indonesia tidak memperhatikan proses produksi dan distribusi pangan. Tidak heran jika

target ketahanan pangan (nasional) sering kali dipenuhi oleh sumber pangan yang diproduksi dengan cara merusak lingkungan dan eksploitatif. Ketahanan pangan (nasional) juga didukung oleh subsidi dan kebijakan yang menghancurkan produsen pangan lokal, namun menguntungkan perusahaan agrobisnis seperti yang terjadi pada program lumbung pangan (*food estate*) yang telah digagas dan dipraktikkan sejak masa Soeharto hingga saat ini.

Jika merujuk pada UU tentang pangan, ketahanan pangan disandingkan dengan kedaulatan pangan yang menekankan hak atas pangan dan sistem pangan lokal-produksi, distribusi, dan konsumsi yang disesuaikan dengan kondisi ekologis—yang menjamin ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal itu menjadikan gagasan dan praktik ketahanan pangan lebih inklusif terhadap, misalnya, praktik penyediaan pangan sehari-hari yang dilakukan oleh perempuan (Turner, Idrobo, Desmarais, & Peredo 2022, 1-27).

Sebuah gerakan petani internasional bernama La Via Campesina, menegaskan sejak awal bahwa “*Food sovereignty is a precondition to genuine food security*” (Kedaulatan pangan merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan yang sejati) (La Via Campesina 1996). Pemahaman itulah yang mendasari penelitian ini untuk tidak hanya menganalisis pola pengaturan pangan oleh pemerintah, tetapi juga praktik penyediaan pangan (mulai dari produksi hingga distribusi) serta konsumsi pangan sehari-hari oleh perempuan, terutama pada masa krisis akibat perang masa revolusi yang belum banyak mendapat perhatian. Membangun pengetahuan seputar komponen yang belum diteliti itu pada gilirannya membantu mengidentifikasi dan lebih memahami awal mula kesadaran ketahanan pangan yang muncul akibat kondisi krisis, resiliensi, kontribusi, dan peranan sentral perempuan dalam mewujudkan kedaulatan dan sekaligus ketahanan pangan.

Pertanian dan Ketersediaan Pangan

Pada awal kemerdekaan, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan di Yogyakarta seperti penggabungan beberapa desa (maksimal lima

desa) menjadi desa baru dengan jumlah penduduk paling banyak 6000 orang. Penggabungan tersebut kemudian berpengaruh pada pengelolaan lahan pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 1 (Soemardjan 2009, 106; ANRI 1987, No. 129).

Tabel 1. Penggabungan Desa-Desa pada 1946.

Kabupaten	Jumlah Desa sebelum Penggabungan	Jumlah Desa setelah Penggabungan
Sleman	262	86
Bantul	195	60
Gunung Kidul	168	141
Kulon Progo	118	47
Adikarto (menjadi bagian dari Kulonprogo pada 1951)	53	41
Daerah Istimewa Yogyakarta	796	375

Sumber: Soemardjan 2009, 106.

Kemerdekaanpun membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pertanian di antaranya para petani membentuk berbagai perkumpulan petani. Perkumpulan itulah yang kemudian menjadi penggerak dan membantu mereka merealisasikan tujuan untuk memperoleh hak dalam pengelolaan tanah, dimulai dari penghapusan “hak-hak konversi” atas tanah perkebunan Belanda dan penyediaan tanah oleh kelurahan-kelurahan untuk perusahaan-perusahaan pertanian di Yogyakarta berdasar UU No.13/ 1948 (ANRI 1945-1949, No. 45, 47). Pemerintah aktif mengadakan penyuluhan tentang pertanian melalui para penyuluh pertanian dan guru-guru di sekolah, tidak lagi melalui pemimpin formal (lurah) seperti pada masa sebelumnya. Mereka memperkenalkan bibit baru, peralatan baru, pupuk, dan memberikan penjelasan mengenai cara baru dalam bercocok tanam agar semakin banyak orang tertarik menjadi petani. Pemerintah berharap dengan semakin banyak petani, maka persediaan bahan pangan akan meningkat (Soemardjan 2009, 275-76).

Menyoal persediaan bahan pangan, Van der Eng menjelaskan bahwa terjadi penurunan secara umum karena situasi politik yang tidak stabil terlebih setelah terjadi revolusi fisik. Sebelum pusat pemerintahan Republik Indonesia berpindah ke

Yogyakarta, pemerintah pusat di Jakarta mengatur penyediaan dan distribusi pangan melalui Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR). Di Jakarta, peran PMR, khususnya dalam penyediaan beras, kemudian diambil alih oleh organisasi lokal, Badan Urusan Makanan Rakyat (BUMA). Kedua lembaga itu tidak dapat berfungsi optimal setelah pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta karena adanya blokade dari pasukan republik yang mengepung Jakarta. Pertambahan jumlah penduduk di Yogyakarta akibat masuknya pejabat pemerintah, tentara, dan pengungsi, terutama setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta menambah beban pemerintah dalam mengatur persediaan dan distribusi bahan pangan (Van der Eng 1994, 39-44).

Dalam laporan statistik oleh Paniradya Ekonomi, Jawatan Pertanian Rakyat, diketahui bahwa bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat petani di Yogyakarta pada 1946 meliputi tanaman padi sawah, padi gogo, jagung, ketela pohon, ketela rambat, serta berbagai jenis ubi dan kacang-kacangan, seperti kacang tanah dan kedelai. Tanaman pangan tersebut terus dibudidayakan selama periode revolusi, terutama padi dan jagung sebagai tanaman pangan paling utama dalam mendukung ketersediaan pangan masyarakat Yogyakarta. Para petani juga menanam tanaman palawija dan berbagai sayuran seperti sayuran hijau (sawi), bawang, cabai merah dan cabai hijau (*lombok*), tomat, wijen, mangga, jeruk, kelapa, dan cantel atau sorgum (*sereal*). Namun sayangnya, sebagian besar tanaman tersebut mengalami puso atau gagal panen. Hanya empat jenis tanaman yang disebut terakhir yang berhasil dipanen, terutama di wilayah Gunung Kidul (ANRI 1987, No. 120).

Selain itu, tercatat dalam laporan bahwa bahan pangan yang diproduksi pada 1946 tidak lebih baik dari panen tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu di sepanjang tahun tersebut. Sebagai contoh, pada April 1946 atau disebut sebagai "bulan repot" dilaporkan bahwa curah hujan sangat kurang. Hanya daerah pegunungan di Kulon Progo yang memiliki cukup air. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh pada jenis dan jumlah tanaman yang berhasil dipanen. Namun demikian,

beberapa wilayah mengalami kelebihan air, terutama Adikarta, Bantul, dan sebagian wilayah Imogiri, khususnya di tepi Sungai Oja. Di Adikarta misalnya, pada Mei 1946, 159 ha yang ditanami padi sawah, 2 ha ditanami jagung, dan 14 ha ditanami ubi manis rusak akibat kelebihan air. Demikian pula areal perkebunan di Bantul yang terdiri atas 36 ha kebun jagung, 5 ha kebun ketela pohon dan 38 ha kebun kedelai rusak karena kelebihan air. Pada Mei, di Sleman Utara juga terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan pada dam-dam di wilayah tersebut (ANRI 1987, No. 120).

Hama tanaman menjadi permasalahan tersendiri di awal 1946, seperti hama tikus yang menyebabkan berkurangnya produksi padi dan ketela di Kabupaten Sleman, terutama Kapanewonan, Godean, Minggir, Seyegan, dan Mlati. Hampir 50% area persawahan yang ditanami padi di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat hama tikus. Hal itu juga terjadi di Gunung Kidul, di mana hama tikus menyerang tanaman ketela pohon seluas 131 ha. Pada Mei 1946, dilaporkan bahwa serangan hama tikus semakin meluas. Hama tersebut tidak hanya menyerang 40% dari 448 ha areal tanaman padi sawah di Sleman, tetapi juga 43 ha kebun Jagung di Gunung Kidul, 5 % dari 93 area tanaman padi di Adikarta serta beberapa area di Bantul. Sementara itu, area persawahan dan perkebunan di Kulonprogo tidak diserang hama tikus sama sekali (ANRI 1987, No. 120).

Selain tikus, uret, dan wereng juga menimbulkan kerusakan. Masing-masing pada tanaman padi gogo yang ditanam di area seluas 1.751 ha di Gunung Kidul dan 83 ha tanaman kedelai di Sleman. Selain itu, terdapat hama *plek* di Gunung Kidul yang merusak tanaman ketela pohon seluas 223 ha. Sementara di Minggir, 60% dari tanaman padi yang ditanam di areal persawahan seluas +97 ha rusak karena hama *mentek* yang menyerang akar dan daun tanaman. Tanaman padi yang terserang hama ini biasanya akan terlihat menguning lebih dulu dibanding tanaman lainnya, bukan karena sudah masak, melainkan mati kering. Beberapa tanda tanaman terserang hama adalah buahnya terlihat tegak yang menandakan kosong atau tidak jadi berbuah. Akarnya juga berubah warna menjadi merah dari

yang seharusnya berwarna putih (ANRI 1987, No. 120).

Sejauh yang dapat ditelusuri, tidak ada angka terperinci terkait pertanian pangan di Yogyakarta setelah 1946 hingga periode revolusi berakhir. Namun demikian, realitas bahwa eskalasi konflik antara Indonesia dan Belanda yang mencapai puncaknya pada Agresi Militer I dan Agresi Militer II menyebabkan situasi di pedesaan tidak aman. Sebagai akibatnya, para petani tidak berani untuk bercocok tanam. Selain para petani, hal serupa juga terjadi di kalangan para petambak garam yang tidak dapat memproduksi garam. Tidak hanya itu, Agresi Militer juga berakibat pada berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian karena mobilisasi penduduk untuk kepentingan perang, kerusakan saluran irigasi, serta pembatasan dan pengawasan transportasi secara ketat (Van der Eng 1994, 43-44). Pada akhirnya, situasi tersebut berdampak pada penurunan persediaan pangan, kenaikan harga, dan distribusi pangan yang terhambat. Tidak heran jika pada periode revolusi, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur persediaan dan distribusi bahan pangan untuk petani, masyarakat nonpetani yang tidak memiliki akses langsung terhadap bahan pangan, dan para prajurit yang berperang.

Pengaturan Bahan Pangan

Pada masa revolusi, di satu sisi, para petani tidak memiliki banyak persediaan bahan pangan. Namun di sisi yang lain, bahan-bahan pokok masih diperjualbelikan di pasar-pasar dengan harga sangat mahal. Asumsi statistik menunjukkan bahwa sejak awal 1946 harga pangan, terutama beras meningkat secara signifikan, yaitu lebih dari 100%. Walaupun tidak secara spesifik disebutkan satuan beratnya, lonjakan harga untuk satu karung beras dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Harga Beras Pada Tahun 1945-1946

Kabupaten	1945 (dalam gulden - f)	1946 (dalam gulden - f)	Persentase Kenaikan (%)
Kota	244,28	588,33	141
Sleman	235,76	574,23	144
Bantul	241,07	578,95	140

Kulon Progo	238,69	611,65	156
Gunung Kidul	248,07	437,54	76
Adikarta	258,66	643,09	149
Yogyakarta	244,42	572,30	134

Sumber: ANRI 1987, No. 120.

Kenaikan harga beras tersebut sangat dipengaruhi oleh distribusi dan hasil panen di masing-masing wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam merespons lonjakan harga tersebut adalah dengan mewajibkan para petani menjual gabah (padi) dan/ atau beras hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan (ANRI 1987, No. 120).

Harga bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, cabai, dan kelapa juga mengalami kenaikan. Kedelai mengalami kenaikan hampir 100% dari tahun sebelumnya dan kelapa harganya naik 300%. Sementara itu, *gaplek* tidak banyak diperjualbelikan, karena jika diperjualbelikan pun harganya sangat mahal. Tidak ditemukan data kuantitatif harga pangan pada tahun-tahun berikutnya. Kendati demikian, seiring dengan penurunan produksi dan kendala distribusi pangan harga tersebut diperkirakan terus meningkat sepanjang periode revolusi (ANRI 1987, No. 120).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam merespons kelangkaan dan kenaikan bahan pangan adalah mendatangkan beras dan *gaplek* dari luar wilayah Yogyakarta. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghemat bahan pangan dan untuk sementara melarang distribusi bahan pangan ke luar wilayah Yogyakarta (ANRI 1987, No. 120). Tidak hanya itu, pemerintah juga rutin memberikan bantuan beras kepada masyarakat. Pada 5 November 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (KNI) memutuskan bahwa terhitung sejak Selasa, 6 November 1945, setiap individu mendapat bantuan beras sebanyak 150 g/ hari dari semula hanya sebesar 75 g/ hari. Jumlah tersebut dianggap ideal untuk memenuhi kebutuhan pangan harian ("Pembagian Beras Kembali Seperti Biasa," 1945). Pemerintah melalui pamong praja dan polisi juga menghimbau agar toko-toko, warung, rumah makan, dan perusahaan yang sengaja tutup dibuka kembali untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan

harian (“Golongan Pedagang dan Peroesahaan,” 1945).

Pada 31 Desember 1945, pemerintah melalui Panitia Kemakmuran Yogyakarta mengeluarkan keputusan untuk mengatur penyaluran beras menggunakan sistem kupon. Setiap kupon setara dengan f0,52 dan berlaku enam hari dan dapat diambil pada akhir pekan. Disebutkan dalam keputusan bahwa kupon beras dapat digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta mulai 1 Januari 1946. Sementara itu, pembagian di luar Kota Yogyakarta dikerjakan bersama-sama dengan pejabat lokal dan Badan-Badan Perwakilan Rakyat di wilayah masing-masing (“Pembelian Beras dan Rentjana Pembagian Minjak Tanah dan Lain2nja,” 1946).

Setelah ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta, pemerintah memutuskan untuk mengintensifkan pengendalian pasokan pangan. Intensifikasi tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Menteri Negara Urusan Pangan pada Juli 1947, menggantikan peran PMR. Sementara itu, PMR bertransformasi menjadi Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang berpusat di Cirebon, Magelang, dan Malang. PPBM di antaranya bertugas memasok bahan pangan, terutama beras, ke gudang-gudang yang ditunjuk oleh pemerintah, mendistribusikan beras kepada masyarakat, mengeksport beras, termasuk mengambil alih tugas pembelian beras untuk membantu India dari Panitia Pengiriman Beras India (Van der Eng 1994, 58).

Pada 14 Agustus 1947, setelah Agresi Militer Belanda I, Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pamong praja dan pamong desa untuk memanen, menyimpan, dan mengamankan bahan pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Hal itu diketahui melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Muda Dalam Negeri, Abdulmadjid Djojodiningrat, kepada Gubernur Jawa Timur, Moerdjani (ANRI 1987, No. 40). Adapun isi dari surat perintah tersebut; *Pertama*, memanen tanaman bahan pangan (padi, ketela, jagung, kedelai, dan sebagainya), terutama tanaman yang ditanam di wilayah yang berdekatan dengan wilayah yang dikuasai musuh, baik yang sudah siap maupun hampir siap panen. *Kedua*,

melakukan kerja sama dengan badan-badan perjuangan agar dapat mempercepat proses panen. *Ketiga*, menyimpan hasil panen sebaik mungkin supaya awet dan tahan lama. *Keempat*, melakukan konsultasi terkait pemilihan tempat penyimpanan bahan pangan dengan pimpinan tentara setempat supaya tidak jatuh ke tangan musuh. *Kelima*, menyimpan bahan pangan di beberapa tempat penyimpanan. Keluarga yang menyimpan bahan pangan untuk jangka waktu lebih dari satu bulan diwajibkan menyimpan persediaan bahan pangan tersebut di tempat yang aman yang jaraknya +2 km dari jalan besar yang mungkin akan dilalui oleh musuh. *Keenam*, menjaga stok bahan pangan di wilayah Republik, misalnya dengan mencegah distribusi bahan makanan ke wilayah yang dikuasai musuh, dan mendatangkan sebanyak mungkin bahan pangan dari wilayah tersebut ke wilayah republik.

Namun demikian, terkait perintah nomor enam, dalam beberapa kasus pejabat pemerintah daerah yang ternyata menghambat pengiriman bahan pangan ke wilayah Yogyakarta karena ingin memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya terlebih dahulu. Hal itu diketahui dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah dari wilayah Jawa Timur. Di samping itu, terdapat imbauan untuk seluruh Rukun Tetangga (RT) di desa-desa di wilayah republik agar bergotong royong mendirikan lumbung perjuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan para tentara yang berangkat bertempur, pasukan-pasukan gerilya, dan para pengungsi. Pasokan dan distribusi pangan mulai pulih ketika terjadi reintegrasi ekonomi di sebagian besar wilayah Indonesia mulai 1948 hingga 1950 (ANRI 1987, No. 40; Van Der Eng 1994).

Perempuan, Pangan, dan Revolusi

Dalam sebuah buku berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta* ditampilkan realitas bahwa pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, penanaman padi secara tradisional—menanam bibit-bibit padi dari persemaian ke sawah—di Yogyakarta lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka biasanya adalah sekelompok tetangga yang terikat dalam sistem gotong royong dan sukarela (tidak dibayar dengan uang). Mereka

memanfaatkan pekerjaan tersebut untuk bertemu, bercengkerama, tertawa, dan bernyanyi sambil memasukkan bibit ke dalam tanah yang lunak dan basah dengan ibu jari tanpa atau sedikit sekali memperhatikan sistem penjarakan antarbibit (Soemardjan 2009, 268).

Setelah kemerdekaan, terutama masa revolusi, hampir tidak ada narasi tentang bagaimana perempuan di desa-desa pergi ke ladang untuk bercocok tanam, seolah semua perempuan hidup di kota, atau narasi tentang mereka yang bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan pangan keluarga ketika sebagian suami, ayah, dan anak (remaja) laki-laki pergi ke medan perang. Sebagaimana dijelaskan di awal, narasi terkait perempuan, pangan, dan revolusi didominasi oleh para perempuan yang bekerja di dapur umum. Sejauh mana perempuan di desa-desa dan organisasi perempuan bekerja bersama-sama mendapatkan bahan pangan, mengolah, dan mendistribusikannya, termasuk mengorganisasi dapur umum tidak mendapat banyak perhatian.

Sejauh yang berhasil ditelusuri, sejumlah artikel di surat kabar, khususnya *Kedaulatan Rakyat*, juga lebih banyak berfokus pada keterlibatan perempuan dalam menyediakan bahan pangan untuk kepentingan perang. Namun demikian, setidaknya artikel-artikel tersebut mampu menyediakan cukup informasi mengenai siapa saja perempuan yang terlibat, meskipun sering kali dihadirkan sebagai agregat, serta sejauh mana mereka mendapatkan, mengolah, dan mengorganisasi pendistribusian pangan selama masa revolusi. Perwari di desa-desa seperti Dongkelan, Danurejan, Puro Pakualaman, Imogiri dan Godean telah berhasil mengumpulkan bahan pangan dan mengolahnya menjadi lauk pauk kering dan tahan lama melalui “gerakan memasak bersama”. Makanan tersebut kemudian diserahkan kepada Perjuangan Puteri Rakyat Indonesia (PPRI) Mataram untuk didistribusikan kepada para prajurit di medan pertempuran dan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik di Yogyakarta maupun di tempat lain (“Bahan Makan Oentoek Pradjoerit di Medan Pertempuran,” 1946).

Penyaluran bahan pangan melalui Perwari dan PPRI Mataram itu dirasa sangat efektif dan mendapat dukungan dari Tentara Keamanan

Rakyat (TKR). Tercatat dari 1 sampai 23 Januari 1946, jumlah sumbangan berupa lauk-pauk kering dan pakaian memenuhi kantor PPRI. Sumbangan tersebut berasal dari perempuan di desa-desa dan berbagai organisasi perempuan, khususnya Perwari cabang Godean, Berbah, Seyegan, Kraton, Jetis, Ngadisuryan, (Ng)ledok Macanan dan Cokrodingratan, Pandak, Barongan (Jetis), Patehan, Panembahan, Moyudan, Gemblakan, Bausasran, Ngadiwinatan, Penumping Gowongan, Nyutran, Timuran, Pingit, Suryatmajan, Danurejan, Kadipaten Kidul, Gamelan, Imogiri, Mergangsan, Barongan (Bantul), dan beberapa daerah lainnya di Yogyakarta. Perwari Panggang (Gunung Kidul) juga mengirimkan 4.100 keping gula merah (“Seroean Kepada Penerima Makanan,” 1946; “Bahan Makanan Membandjiri PPRI,” 1946; “Bahan Makanan Oentoek Pradjoerit2 Kita,” 1946). Organisasi perempuan Muhammadiyah atau Aisiyah juga membentuk panitia khusus yang bertugas untuk memberikan bantuan bahan makanan baik kepada masyarakat Yogyakarta maupun wilayah republik di luar Yogyakarta. Organisasi yang pada saat itu digawangi oleh Siti Moendijah dan Nyi Handasah itu juga membagikan pakaian bekas layak pakai untuk keluarga korban perang, seperti keluarga korban bom di Kauman (“Panitya Oesaha Pertolongan Moehammadijah,” 1946).

Sementara itu, hasil wawancara terkait bahan pangan dan pengalaman konsumsi pada masa revolusi menunjukkan narasi yang seragam. Para narasumber menarasikan periode tersebut sebagai “zaman serba sulit” dan “serba mahal”. Walaupun demikian, dijelaskan bahwa situasi di pedesaan, terutama tempat mereka tinggal, relatif aman karena jauh dari pos tentara republik dan jalan raya. Sebagai contoh adalah Mujilah yang menegaskan berkali-kali tentang masa sulit dan harga pangan yang serba mahal dalam kutipan sebagai berikut.

“Sulit itu, sulit sekali... Kalau saya dulu sudah diberi susu... dari Pak Lurah, hanya susu saja, tidak ada makanan lain... tiap minggu... Susu nya itu dari susu sapi. Saya sudah besar ya, saya sudah sekolah. Dulu namanya sekolah rakyat, sekolah SD (Sekolah Dasar) zaman dulu. Zaman dulu apa-apa mahal. Jadi ya apa-apa mahal

semua...Saya ketika masih kecil dibuatkan bubur dari beras, jaman dulu apa-apa mahal” (Mujilah 2023).

Mujilah menambahkan bahwa keluarganya lebih sering mengolah makanan sendiri dan melarang membeli makanan, karena dikhawatirkan makanan tersebut kotor.

“[...] Iya, buat sendiri. Kalau beli nanti kotor kata simbah saya. Makanan kotor jangan dibeli” (Mujilah 2023).

Mengingat situasi saat itu, sangat mungkin hal tersebut dilakukan sebagai upaya penghematan, bukan berdasar pada kesadaran soal makanan sehat semata. Sintem juga mengungkapkan bagaimana sulitnya mendapatkan bahan pangan. Ia lebih sering mengonsumsi *tiwul*, *gaplek*, atau jika beruntung *tiwul* yang dicampur beras (nasi), karena beras (nasi) saat itu hanya diperuntukkan bagi lansia seperti tampak pada pernyataan berikut:

Kalau nasi beras itu yang makan simbah-simbah yang sudah tua, kalau *tiwul* biasanya anak-anak dengan umur tertentu...Iya, *tiwul* dicampur beras (nasi)...dengan urap...enak! Sekarang saja saya itu, kadang ingin makan (makanan tersebut) ketagihan...ya sejenis ayam itu dulu tidak ada. Kalau dulu itu prihatin Mbak!” (Sintem 2023).

Suami Sintem, Sirin Hartono, memotong pembicaraan dengan kisahnya sendiri yang turut memberi kesaksian mengenai periode sulit tersebut. Makan nasi baginya adalah suatu kemewahan dan pengalaman yang paling membahagiakan sebagaimana diungkap dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Wah kalau dulu makan nasi beras itu rasanya tidak terkira. Makannya ya *gaplek*, *tiwul*. Nanti kalau dikasih nasi beras tidak bisa berkata-kata karena enak sekali” (Sirin Hartono 2023).

Hal yang kurang lebih sama diceritakan Kasiyem. Sering kali ia dan keluarganya hanya dapat membeli *singkong*, jenis bahan pangan yang

mendominasi pasar saat itu. Sementara bahan pangan lain, terutama beras, harganya sangat mahal.

“[...] Ooo (makannya) biasa, (Zaman) Jepang itu nasi sesuai harganya mahal. Zaman Jepang harga serba mahal sekali...Belanda (sewaktu revolusi) juga iya, baru makmur setelah merdeka seperti sekarang ini” (Kasiyem 2023).

Namun demikian, ia mengolah *singkong* menjadi berbagai jenis makanan, seperti *tiwul* yang dicampur (*dikrawu*) dengan kelapa, *singkong* rebus dengan lauk sayur gori (nangka muda) atau sayur pepaya agar tidak bosan (Maguwoharjo 2023). Ide untuk mengolah *singkong* ataupun bahan pangan lain ke dalam berbagai olahan ini dilakukan oleh hampir semua narasumber. Hal itu menunjukkan bentuk strategi dan adaptasi perempuan terhadap keterbatasan pangan.

Semua narasumber, kecuali Mujilah, menyatakan bahwa tidak ada bantuan pemerintah yang sampai kepada mereka, sehingga mereka harus membeli bahan pangan di pasar atau di pedagang keliling dan/atau memanfaatkan bahan pangan di sekitar mereka. Hal itu berarti bahwa distribusi bantuan pangan yang diberikan pemerintah tidak merata sampai ke desa-desa. Pemanfaatan bahan pangan di sekitar tempat mereka tinggal juga menjadi bentuk strategi dan adaptasi untuk merespons keterbatasan pangan, di antaranya dengan mengolah sayur yang tumbuh liar di hutan, membuat minyak kelapa atau minyak kacang sendiri, dan mengonsumsi belalang sebagai makanan alternatif pengganti daging ayam atau sapi seperti yang diceritakan oleh Sintem sebagai berikut.

“[...] Kalau masak dengan bahan seadanya. Jika sedang ingin memasak daun lembayung tinggal ambil di hutan...Sejak saya belum ada, walang sudah ada. Enak...apalagi kalau disambal. Digoreng, nanti digoreng diberi kelapa dan cabai sedikit diberi bumbu bawang merah dan bawang putih, garam dihaluskan itu namanya *gethik*. Iya, *gethik* walang itu awet untuk lauk” (Sintem 2023).

Strategi adaptasi lainnya adalah dengan menjadi penjual makanan olahan hasil dari sawah dan kebun sendiri, seperti nasi jagung, *gatot*, *tiwul*, *cantel* dan sayur mayur. Selain menghasilkan pendapatan, aktivitas tersebut juga memudahkan mereka untuk menyisihkan makanan untuk keluarga atau bahkan digunakan sebagai media barter untuk memenuhi kebutuhan lain (Suratiyah 2023; Suwartinah 2023; Mujilah 2023; Sintem 2023).

Para perempuan juga mengurangi kuantitas makanan untuk memastikan semua anggota keluarga, terutama anak-anak cukup makan. Hal itu terungkap antara lain dari yang dikisahkan Sintem:

“Misal punya telur dua, anaknya lima, terus dua telur tersebut didadar dan diiris-iris menjadi lima bagian” (Sintem 2023)

Pernyataan Suratiyah semakin menegaskan signifikansi peranans perempuan (Ibu) dalam penyediaan pangan dan ia mewarisi tugas tersebut hingga ketika berumah tangga yang diungkap sebagai berikut.

“Di desa itu (kalau makan) yang penting ada sayurnya [...] Kalau Ibu makan saya juga makan” (Suratiyah 2023).

Hal yang sama juga terungkap dari penuturan narasumber lain, seperti Mujilah dan Kasiyem. Umumnya mereka makan dua kali sehari, pada siang dan sore. Mereka dan Ibu mereka bahkan sering kali makan paling terakhir setelah semua anggota keluarga selesai makan (Mujilah 2023; Kasiyem 2023).

Sikap dan tindakan tersebut tampaknya merupakan hal yang universal setidaknya dalam konteks masyarakat Asia dan Afrika yang memuja pengorbanan perempuan (Ramachandran 2008, 1-22; Tacoli, Bukhari & Fisher 2013, 1-23). Pada saat yang sama, mereka juga bekerja lebih lama dibanding anggota keluarga laki-laki, terutama karena mereka melakukan beberapa aktivitas sekaligus, yaitu ikut mengelola lahan pertanian dan perkebunan, mengolah bahan pangan, menghasilkan pendapatan dengan berjualan makanan, dan merawat anak.

Suwartinah menceritakan hal yang sedikit berbeda dari narasumber lain. Ia menyiratkan bagaimana pengalaman pribadi dianggap tidak relevan atau tidak lebih penting daripada pengalaman kolektif. Ia menunjukkan ingatan yang kabur dan inkonsisten, mengingat usianya yang tidak lagi muda (86 tahun). Sebagai contoh adalah ketika menceritakan pengalaman konsumsi yang bercampur baur dengan ingatan dan pengalaman pada periode sebelumnya, terutama periode pendudukan Jepang serta ingatan dan pengalaman di masa kecil (*childhood memory*). Ia memperlihatkan ekspresi dan respons keengganan, malu-malu, dan ragu-ragu ketika harus mengingat dan menceritakan pengalaman masa lalu yang sulit (Suwartinah 2023).

Bagaimanapun juga harus diakui memang tidak ada yang memiliki ingatan asli. Adapun yang diceritakan adalah versi yang lebih baru dari ingatan tersebut. Ingatan sebagai ‘a form of mentalité’, cara berfikir, dan refleksi diri, juga sering kali dipengaruhi oleh ingatan kolektif, serta apa yang didengar dan dibaca (Sigmund Freud dalam Lorna Marte 2011; Selma Leydesdorff, Luisa Passerini, & Paul Thompson 1996). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ingatan dan pengalaman pribadi para perempuan sangat dipengaruhi oleh ingatan kolektif dan apa yang mereka dengar dan/atau baca. Namun demikian, setidaknya pengalaman perempuan yang dituturkan oleh para narasumber mampu menambah narasi mengenai pengalaman konsumsi, strategi dan adaptasi perempuan terhadap keterbatasan pangan, resiliensi, serta peranan dan kontribusi perempuan dalam rantai pangan (rumah tangga).

Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa ketika terjadi krisis akibat perang pada masa Revolusi Indonesia, kehidupan rumah tangga sepenuhnya dikelola dan dijalankan oleh perempuan. Mereka tidak hanya mengolah makanan hingga siap dihidangkan, melainkan juga memproduksi dan bahkan mendistribusikannya untuk kepentingan negara, dalam hal ini tentara di medan perang. Namun sebaliknya, negara tidak selalu hadir ketika mereka membutuhkan bantuan. Adakalanya perempuan

juga harus mencari sumber pendapatan untuk membeli bahan pangan. Peranan-peranan yang dibebankan dan dipaksakan kepada perempuan secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor utama dalam rantai pangan (rumah tangga).

Bagi perempuan, ketahanan pangan tentu saja bukan suatu kondisi ideal seperti dikonsepsikan saat ini. Para perempuan harus dihadapkan pada situasi di mana mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan makan–terkadang tanpa memperhatikan pola makan sehat bergizi dan seimbang–bagi diri dan keluarganya. Kondisi itulah yang memunculkan strategi, adaptasi, dan resiliensi. Tidak heran jika pada periode itu sejumlah makanan olahan baru “ditemu-ciptakan” dari yang semula sekadar memenuhi rasa lapar menjadi olahan yang juga memenuhi selera lidah, sehingga menambah variasi produk makanan. Namun sayangnya, penemuan tersebut hampir tidak pernah dianggap sebagai bagian dari revolusi ilmu kerumahtanggaan (domestic science) yang ditempatkan sama penting dan sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam konteks historiografi, dominasi narasi revolusi yang lebih terfokus pada kekerasan dan perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan daripada dinamika yang terjadi selama periode krusial tersebut telah mengubur ingatan dan pengalaman keseharian perempuan dalam mengakses, memperoleh, mengolah, mengonsumsi, dan mendistribusikan pangan. Sejauh menyoal perempuan dan persoalan pangan, narasinya terbatas pada keterlibatan mereka di dapur umum. Narasi semacam itulah yang direproduksi dan dikutip lintas generasi. Mempraktikkan Sejarah Lisan sebagai sebuah metode dan metodologi setidaknya membawa pada penemuan sejauh mana praktik itu mampu mengungkap keberagaman realitas (pengalaman) keseharian perempuan dalam mengatasi persoalan pangan (rumah tangga) dan interpretasi atas realitas tersebut.

Hal itu memang tidak mudah dilakukan. Setidaknya perlu dilakukan “gerilya” dalam pencarian narasumber ke wilayah pedesaan dan/atau memperluas lokus penelitian untuk menggali lebih banyak lagi pengalaman dan kontribusi individu (perempuan) dalam ketahanan pangan

(rumah tangga) pada masa awal kemerdekaan yang berkontribusi langsung pada sistem dan struktur pangan saat ini. Akan tetapi, upaya semacam itu tetap penting, bukan hanya untuk memperkaya historiografi Revolusi Indonesia dan perempuan secara umum, melainkan juga untuk melacak kronologi kesadaran pangan; mengevaluasi peranan aktor (perempuan); memahami perspektif perempuan tentang ketahanan pangan guna merancang pencegahan dan mitigasi risiko kerawanan pangan; mengidentifikasi budaya material terkait proses produksi, konsumsi dan distribusi pangan dalam sebuah komunitas; dan memperhitungkan faktor kesejarahan dalam membuat kebijakan ketahanan pangan.

Catatan

Terima kasih kepada Tamim Umar Herdiyanto dan Dian Octaviani, mahasiswa Prodi S1 Sejarah, Departemen Sejarah FIB UGM, yang telah membantu mengumpulkan data penelitian untuk artikel ini.

Referensi

- Ambar Sasi, Galuh. 2023. “Makna merdeka bagi perempuan Yogyakarta, 1945-1946.” Dalam *Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949*, diedit oleh Bambang Purwanto, Roel Frakking, dkk., 29-44. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anderson, Ben. 1966. “The Problem of Rice: Stenographic Notes on the Fourth Session of the Sanyo Kaigi, January 8, 2605, 10:00 A.M.” *Indonesia*, no. 2: 77-123.
- Ara, Satoshi. 2008. “Food Supply Problem in Leyte, Philippines, during the Japanese Occupation (1942-44).” *Journal of Southeast Asian Studies* 39 (1): 59-82.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (1987). *Inventaris Arsip Dalam Negeri, No. 120, 40, 45, 47*. Jakarta: ANRI.
- Astuti, Sri Retna. 1990. “Peranan Dapur Umum Dalam Masa Revolusi 1945 – 1949 di DIY, Sebuah Studi Awal.” *Jarahnitra*. Yogyakarta: Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Astuti, Sri Retna. 2006. "Ibu Ruswo, Pejuang Wanita dan Ibu Prajurit." *Jantra* 1 (2): 75-79.
- "Bahan Makan Oentoek Pradjoerit di Medan Pertempoeran." *Kedaulatan Rakjat*, 3 Januari 1946.
- "Bahan Makanan Membandjiri PPRI." *Kedaulatan Rakjat*, 12 Januari 1946.
- "Bahan Makanan Oentoek Pradjoerit2 Kita." *Kedaulatan Rakjat*, 12 Januari 1946.
- Choudhary, Neetu, dan D. Parthasarathy. 2007. "Gender, Work and Household Food Security." *Economic and Political Weekly* 42 (6): 523-531.
- Coorengel, C.B. : 1940. *Memboeat Makanan Jang Tahan Lama*. Disalin oleh M. Rasjad. Batavia, Balai Pustaka. De Mol, G.A. 1940. *Gezonde voeding: leerboek ten dienste van het huishoudonderwijs in Nederlandsh-Indië*. Groningen [etc.]: Wolters.
- Devi R, Fadhilah. 2015. "Hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Wanita Usia Subur di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman." Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- "Golongan Pedagang dan Peroesahaan: Beroesaha Mengirimkan Bahan Makan ke Medan Pertempoeran." *Kedaulatan Rakjat*, 4 Desember 1945.
- Halewijn, E.K.E. 1932. *Gaplek als grondstof voor de bereiding van cassavemeel*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Hidayat, Rizal, dan Siswanta. 2022. "Peran Dapur Umum dalam Mendukung Perjuangan Masyarakat Dusun Kemusuk Pada Agresi Militer Belanda II 1949." *Historical Studies Journal* 4 (1): 30-40.
- Inaudi, Silvia. 2015. "Assistance and Food Education: The Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, 1947-1965." *Contemporanea* 18 (3): 373-400.
- Instituut voor Volksvoeding. 1940. *Makanan Jang baik di masa perang*. Diterjemahkan oleh H. B. Jassin. Batavia: Volkslectuur.
- Instituut voor Volksvoeding. 1941. *Pedoman Roemah Tangga: Makanan jang Moerah tetapi Baik*. Batavia: Balai Poestaka.
- Instituut voor Volksvoeding. 1941. *Pedoman Roemah Tangga: Masak-Masakan Moerah Serie No. 1434*. Batavia: Balai Poestaka.
- Jarosz, Lucy. 2014. "Comparing Food Security and Food Sovereignty Discourses." *Dialogues in Human Geography* 4 (2): 168-81.
- Kasiyem, Wawancara Pribadi, Maguwoharjo, Senin, 19 Juni 2023, Pukul. 15.00 WIB.
- Kurasawa, Aiko. 1998. "Transportation and Rice Distribution in South-East Asia during the Second World War." Dalam *Food Supplies and the Japanese Occupation in Southeast Asia*, diedit oleh P.H. Kratoska, 32-66. London: Macmillan.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT. Grasindo.
- La Via Campesina. 1996. *The Right to Produce and Access to Land*. Rome: La Via Campesina.
- La Via Campesina. A movement of movements and the global voice of peasants who feed the World." Diakses pada 20 Juni 2023. <https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/LVC-EN-Brochure-2021-03F.pdf>.
- Lassa, Jonatan. 2005. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*. Jakarta: ZEF.
- Leydesdorff, Selma and Nancy Adler. 2013. "Introduction: On the Evidence Value of Personal Testimony." Dalam *Tapestry of Memory, Evidence and Testimony in Life Story Narratives*, diedit oleh Nanci Adler and Selma Leydesdorff, ix-xxix. London: Transaction Publisher.
- Marten, Lorna. 2011. "Introduction of Writing Childhood Memory." *The Promise of Memory: Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism*, 1-55. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mathur, Arpita. 1994. "Women and Food Security: A Comparison of South Asia and Southeast Asia." *South Asian Survey* 18(2): 181-206.
- Maxwell, Simon. 1996. "Food Security: A Post-Modern Perspective." *Food Policy* 21 (2): 155-70.
- Mears, L. 1984. "Rice and Food Self-Sufficiency in Indonesia." *XX* (2): 122-138.
- Mujilah, Wawancara Pribadi, Panti Wredha, Panembahan Yogyakarta, Senin, 29 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.
- Nzayisenga, Marie Jeanne, Camilla Orjuela and Isabell Schierenbeck. 2016. "Food

- (In)Security, Human (In)Security, Women's (In)Security." *African Security* 9 (4): 278-298.
- "Panitya Oesaha Pertolongan Moehammadijah." *Kedaulatan Rakjat*, 5 Januari 1946.
- "Pembagian Beras Kembali Seperti Biasa." *Kedaulatan Rakyat*, 5 November 1945.
- "Pembelian Beras dan Rentjana Pembagian Minjak Tanah dan Lain2nja." *Kedaulatan Rakjat*, 1 Januari 1946.
- Poerwanto, Muhamad Supraja, Harsoyo, & Soeprapto. 2016. "Model Ketahanan Pangan Berperspektif Gender." *Dimensi* 9 (2): 93-101.
- Rahman, Fadly. 2021. "Bertumbuh dan Mengakar: Sejarah Pembudidayaan Ketela Pohon di Indonesia." *Metahumaniora* (2): 222-235.
- Ramachandran, Nira. 2008. "Underfed, Underpaid and Overlooked: Women, the Key to Food Security in South Asia." *International Institute for Environment and Development* (136): 1-22.
- Rambe, Hanna. 1983. *Mencari Makna Hidupku Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Restu, Alfrida. 2018. *Di Bawah Bendera Fasisme: Kehidupan Anak-Anak di Yogyakarta pada masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Yogyakarta: Dialog Pustaka.
- Salvatici, Silvia. 2015. "Writing the History of Food Security since 1945." *Contemporanea* 18 (3): 347-354.
- Sato, Shigeru. 2006. "Indonesia 1939-1942: Prelude to the Japanese Occupation." *Journal of Southeast Asian Studies* 37 (2): 225-248.
- Sato, Shigeru. 1998. "Oppression and Romanticism: The Food Supply of Java during the Japanese Occupation." Dalam *Food Supplies and the Japanese Occupation in South-East Asia*, diedit oleh Paul H. Kratoska, 167-186. New York: ST. Martin's Press.
- "Seroean Kepada Penerima Makanan." *Kedaulatan Rakjat*, 8 Januari 1946.
- Sintem, Wawancara Pribadi, Gunung Kidul, Kamis, 25 Mei 2023, Pukul. 15.20 WIB.
- Sirin Hartono, Wawancara Pribadi, Gunung Kidul, Kamis, 25 Mei 2023, Pukul. 15.20 WIB.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suhatno. 2006. "Sumbangan Wanita Yogyakarta pada Masa Revolusi." *Jantra* (1) 2: 67-74.
- Sumintarsih, Sri Sumarsih, & Sri Retno Astuti. 1990. *Adat dan Budaya Jawa: Suatu Studi Awal Tentang Batik, Upacara Tolak Bala dan Peranan Dapur Umum Dalam Masa Revolusi*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Suratiyah, Wawancara Pribadi, Kulonprogo, Sabtu, 13 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 2008. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suwarnah, Wawancara Pribadi, Panti Wredha, Panembahan Yogyakarta, Senin, 22 Mei 2023, Pukul. 11.00 WIB.
- Tacoli, Cecilia, Budoor Bukhari, & Susannah Fisher. 2013. "Urban Poverty, Food Security and Climate Change." *International Institute for Environment and Development (iied-briefing)*: 1-23.
- Tashadi, Darto Harnoko, Suratmin, & Hisbaron Muryanto. 1992. *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Turner, Katherine L., C. Julian Idrobo, Annette Aurélie Desmarais, & Ana Maria Peredo. 2022. "Food Sovereignty, Gender and Everyday Practice: The Role of Afro-Colombian Women in Sustaining Localised Food Systems." *The Journal of Peasant Studies* 49 (2): 1-27.
- Uraguchi, Zenebe Bashaw. 2010. "Food Price Hikes, Food Security, and Gender Equality: Assessing The Roles and Vulnerability of Women in Households of Bangladesh and Ethiopia." *Gender and Development* 18, (3): 491-501.
- Van der Eng, Pierre. 1994. *Food Supply in Java During War and Decolonization, 1940 1950*. Hull: Centre for South-East Asian Studies, University of Hull.
- Van der Eng, Pierre. 2020. "Peraturan dan Pengendalian: Menjelaskan Penurunan Produksi Pangan di Jawa 1940-1946 dan

Kelaparan 1944-1945." *Lembaran Sejarah* 16 (1): 3-24.

Wieters, Heike. 2015. "The World's Hungry, American NGOs and New Private-Public Partnership after WWII." *Contemporanea* 18 (3): 355-372.

Winarni, V Agus Sulisty, & Yustina Hastrini Nurwanti. 2013. *Dapur Umum Masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.